



Peran Kepala Desa Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Hamdan Aisy Zuhdan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: aisyzuhdan@gmail.com

Rachmawati Novaria

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nova@untag-sby.ac.id

Adi Soesiantoro

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: adisusiantoro@untag-sby.ac.id

Abstract. *The role of the village head in bureaucratic reform refers to an action or contribution provided by a leader to improve a bureaucratic system to be better than before. The background of this research is due to the lack of bureaucracy responsiveness in public services in Sambibulu Village, Taman District, Sidoarjo Regency. Therefore, the research objective is to identify and analyze the role of the village head in bureaucratic reform of public services in Sambibulu Village, Taman District, Sidoarjo Regency. This research is qualitative in nature with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants are the Village Head, Village Secretary, and the villagers of Sambibulu. The theory used refers to the Servant Leadership theory by Barbuto & Wheeler (2006) which includes indicators such as Altruistic Calling, Emotional Healing, Wisdom, Persuasive Mapping, and Organizational Stewardship. The results of this study show that overall, the role of the village head in bureaucratic reform of public services in Desa Sambibulu is very significant. Through commitment, wisdom, and effective leadership, he acts as a change agent driving the establishment of a more efficient, responsive, and quality public service system. In addition, the village head is actively involved in various aspects ranging from democratic values, openness to community participation, to the ability to lead with an innovative approach. The Village Head of Sambibulu plays a role in realizing quality public services oriented towards community interests. However, there is still a gap between public expectations and reality, such as inconsistency in implementing responsive public services.*

Keywords: *Role of the Village Chief, Bureaucratic Reform, Public Services*

Abstrak. Peran kepala desa dalam reformasi birokrasi merujuk pada sebuah tindakan atau kontribusi yang diberikan oleh seorang pemimpin untuk memperbaiki sebuah tatanan birokrasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu karena kurangnya responsivitas birokrasi pelayanan publik di desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena hal tersebut tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk informannya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Masyarakat desa Sambibulu. Sedangkan teori yang digunakan yaitu mengacu pada teori kepemimpinan Servant Leadership menurut Barbuto & Wheeler (2006) meliputi indikator Altruistic Calling, Emotional Healing, Wisdom, Persuasive Mapping, dan Organizational Stewardship. Hasil penelitian ini yaitu secara keseluruhan, peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di Desa Sambibulu sangatlah signifikan. Melalui komitmen, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang efektif, beliau berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas. Selain itu kepala desa berperan aktif dalam berbagai aspek seperti mulai dari nilai-nilai demokrasi, keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat, hingga kemampuan untuk memimpin dengan pendekatan inovatif. Kepala Desa Sambibulu berperan dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan seperti kurang konsisten dalam menerapkan pelayanan publik yang responsif.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Peran Pemerintah Desa sebagai badan pemerintahan yang memiliki kontak langsung dengan masyarakat berimplikasi signifikan dalam kehidupan berkomunitas. Tugas-tugas yang diemban oleh Pemerintah Desa meliputi berbagai aspek yang sangat vital, mulai dari manajemen keuangan yang disiplin, pembangunan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk keberlanjutan lingkungan, hingga penyelesaian konflik dan penyediaan layanan dasar yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan warga. Melalui keberadaannya yang efektif, Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membimbing mereka menuju arah kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa sebagai pemimpin utama dalam struktur Pemerintah Desa memiliki tugas-tugas yang sangat kompleks. Tugas-tugas ini mencakup mulai dari menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila hingga memperjuangkan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik, kepala desa tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas administratif semata, tetapi juga harus memiliki semangat pembimbing dan pengarahan, dengan fokus utama yang mengedepankan kepentingan umum tanpa adanya motif atau keuntungan pribadi.

Reformasi birokrasi, sebagai upaya sistematis untuk melakukan perubahan dan peningkatan dalam kinerja birokrasi, memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan sangat signifikan. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas serta efisiensi birokrasi dalam waktu yang lebih singkat, serta meningkatkan standar perumusan dan penerapan kebijakan. Meskipun pelayanan publik di Kelurahan Sambibulu sudah memanfaatkan sistem online yang diharapkan dapat mempercepat proses dan meningkatkan responsivitas birokrasi, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Beberapa tantangan yang muncul termasuk ketidakjelasan mengenai tenggat waktu dalam penyelesaian berkas kependudukan serta kompleksitas dalam proses pengurusan surat tanah. Hal ini menunjukkan perlunya responsivitas birokrasi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan masyarakat, karena responsivitas ini dapat berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam konteks responsivitas birokrasi yang terkadang masih kurang optimal, dibutuhkan upaya-upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan birokrasi dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat dan lebih cepat. Hanya melalui

langkah-langkah ini, pelayanan publik yang disediakan akan menjadi lebih responsif terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dicapai dengan lebih baik dan lebih efisien dari sebelumnya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang mendalam, mendalam, dan intensif pada subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang mendalam tentang subjek (Baxter & Jack, 2008) dalam Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena membahas peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik. Ini adalah masalah yang sangat penting dalam konteks pemerintahan di tingkat desa. Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah rencana dan jalur penelitian yang mencakup asumsi-asumsi luas hingga teknik khusus untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada masalah birokrasi pelayanan publik yang tidak responsif di tingkat desa khususnya di kelurahan Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan menyelidiki apa saja peran yang diberikan kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di tingkat desa. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi dan menganalisis peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel purposive digunakan. Ini adalah metode pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Peneliti membutuhkan alat bantu untuk mendukung fungsinya sebagai instrumen penting. Untuk membantu dalam pengumpulan data di lapangan, instrumen pendukung adalah alat pengumpulan data yang sangat penting. Menurut Creswell (1994) dalam (Pahlevynur et al., 2022), observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah instrumen pendukung dalam penelitian kualitatif.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi langkah penting dalam menghasilkan hasil yang relevan dan dapat diandalkan dalam penelitian kualitatif yang menggali peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan instrumen dari Model Analisis Interaktif Miles &

Huberman. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, dan penyampaian data (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

A. Altruistic Calling

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kepala desa dalam menerapkan prinsip-prinsip servant leadership. Kepala desa yang sukses dalam peran ini menunjukkan berbagai tindakan nyata yang mengutamakan kepentingan warga, seperti membantu warga mendapatkan pekerjaan dan mengantar warga sakit ke rumah sakit di luar jam kerja. Tindakan ini mencerminkan dedikasi dan pengorbanan pribadi demi kepentingan masyarakat, sejalan dengan prinsip Altruistic Calling.

Selain itu, kepala desa juga terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, janda, dan anak yatim, serta program peningkatan gizi balita dan ibu hamil untuk mencegah stunting. Upaya ini menunjukkan visi jangka panjang kepala desa untuk meningkatkan kualitas hidup warga yang rentan.

Kepala desa turut menyediakan pelayanan administratif di malam hari dan mengembangkan sektor agrowisata, yang menunjukkan upaya untuk menciptakan peluang ekonomi baru dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Partisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menunjukkan komitmen kepala desa terhadap kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Namun, penelitian ini menemukan beberapa kesenjangan dalam pelaksanaan, seperti terkadang proses perizinan yang dipersulit dan kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tindakan kepala desa dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Penelitian ini menyoroti bahwa kepala desa yang menerapkan prinsip-prinsip servant leadership berhasil dalam banyak aspek, seperti mengutamakan kepentingan warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam konsistensi pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya peningkatan pelatihan, komunikasi, dan mekanisme umpan balik antara kepala desa dan warga.

B. Emotional Healing

Peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik sangat penting, terutama dengan model kepemimpinan servant leadership. Salah satu elemen kunci dalam model ini adalah Emotional Healing, yang melibatkan komitmen dan keterampilan pemimpin untuk membantu individu mengatasi trauma emosional. Kepala desa menekankan bahwa pelayanan publik harus ramah dan sopan untuk membantu warga mengatasi stres yang muncul dari perbedaan antara harapan mereka dan prosedur yang berlaku.

Ketika warga menghadapi frustrasi karena perbedaan ekspektasi dan realitas birokrasi, pendekatan kepala desa yang ramah dan empatik dapat meredakan stres emosional. Mendengarkan keluhan warga dengan penuh perhatian dan memberikan penjelasan dengan pendekatan yang halus meningkatkan rasa tenang dan kepercayaan warga, serta mengurangi potensi konflik dan kebingungan.

Pelayanan yang ramah dan mendengarkan secara aktif membantu warga merasa dihargai dan dipahami, yang mempercepat pemulihan emosional mereka. Pendekatan ini juga meningkatkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih manusiawi dan mendukung.

Kepala desa yang menerapkan prinsip-prinsip servant leadership dengan fokus pada emotional healing menunjukkan komitmen untuk membantu warga mengatasi masalah emosional. Melalui sikap ramah, empati, dan komunikasi yang baik, kepala desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih responsif dan manusiawi.

C. Wisdom

Indikator Wisdom dalam kepemimpinan mencerminkan kemampuan pemimpin untuk memahami dan mengantisipasi situasi di sekitarnya. Kepala desa menunjukkan kewaspadaan dengan memilah informasi yang disebarluaskan kepada warga, mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ketertiban di masyarakat.

Kepala desa juga bertanggung jawab membuat kebijakan yang memperhitungkan dampak jangka panjang, seperti melengkapi perangkat desa dengan keahlian teknologi informasi untuk memastikan pelayanan publik tetap relevan di era digital. Dengan menerima kritik dan saran dari warga, kepala desa menunjukkan kesadaran akan pentingnya umpan balik dalam pengambilan keputusan dan kesiapan untuk melakukan penyesuaian kebijakan.

Proaktif dalam mencegah potensi masalah informasi dan menunjukkan kemampuan melihat dampak jangka panjang dari kebijakan adalah contoh dari pemimpin yang bijaksana.

Kepala desa yang bijaksana membantu menciptakan lingkungan pelayanan publik yang responsif dan adaptif, menjaga ketertiban, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

D. Persuasive Mapping

Penelitian ini menganalisis peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik melalui teori kepemimpinan *servant leadership*, khususnya indikator *Persuasive Mapping*. Indikator ini mengukur keterampilan pemimpin dalam memetakan masalah, mengkonseptualisasikan peluang, dan mendorong orang lain untuk bertindak sesuai visi yang diartikulasikan. Kepala desa menekankan pentingnya musyawarah dan diskusi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi bersama, menunjukkan kemampuan untuk memetakan persoalan dan menawarkan alasan kuat untuk kerjasama.

Kepala desa selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendorong warga untuk memiliki impian besar tentang kemajuan desa. Kepala desa menggunakan pengaruhnya secara bijaksana untuk mendapatkan dukungan terhadap kebijakan, memastikan partisipasi aktif warga dalam mencapai tujuan bersama.

Kepala desa juga menyediakan kotak saran di balai desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan rasa memiliki di antara warga. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, kepala desa menciptakan solusi yang efektif dan adil, serta meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil.

Kepala desa yang fokus pada indikator *Persuasive Mapping* menunjukkan kemampuan untuk memetakan persoalan, mengkonseptualisasikan peluang, dan meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama. Melalui musyawarah, diskusi, penggunaan pengaruh, dan pembukaan ruang partisipasi, kepala desa menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan efektif.

E. Organizational Stewardship

Penelitian ini menganalisis peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik melalui teori kepemimpinan *servant leadership*, khususnya indikator *Organizational Stewardship*. Indikator ini mengukur sejauh mana pemimpin mempersiapkan organisasi untuk berperan positif terhadap lingkungannya melalui program pengabdian masyarakat dan pengembangan komunitas.

Kepala desa menetapkan arah dan tujuan program pelayanan publik untuk membangun desa sebagai komunitas yang kohesif dan inklusif. Dengan mengutamakan pegawai berpendidikan dan sarana-prasarana memadai, kepala desa menciptakan lingkungan kerja profesional yang mendukung kolaborasi. Kepala desa juga mendorong penggunaan teknologi

untuk efisiensi pelayanan, meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, dan memastikan kebutuhan serta aspirasi warga didengarkan dan dipenuhi.

Sebagai pengambil keputusan strategis, kepala desa mempersiapkan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan dengan mengisi posisi kosong dengan pegawai berkualifikasi, memfasilitasi kolaborasi antar pegawai, dan mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Kepala desa berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, dan pemimpin yang menghubungkan organisasi dengan masyarakat, mengarahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan rasa memiliki di antara pegawai desa.

Dengan menetapkan arah yang jelas, mendorong teknologi, memfasilitasi kolaborasi, dan mengambil keputusan strategis, kepala desa menerapkan prinsip-prinsip servant leadership yang fokus pada Organizational Stewardship. Pendekatan ini menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di Desa Sambibulu sangat signifikan. Kepala desa berperan sebagai pemimpin administratif dan agen perubahan yang memegang peran kunci dalam memperbaiki sistem pelayanan publik. Pada Altruistic Calling: Kepala desa menunjukkan dedikasi tinggi, memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, dan aktif membantu memenuhi kebutuhan warga melalui kebijakan yang dibuat.

Selanjutnya dalam Emotional Healing: Kepala desa membantu memulihkan semangat warga dengan mendengarkan keluhan mereka dan berupaya memperbaiki pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Lalu pada indikator Wisdom: Kepala desa mampu memetakan persoalan kompleks, mengelola informasi dengan baik, dan mengambil keputusan bijaksana untuk kepentingan bersama.

Persuasive Mapping: Kepala desa meyakinkan dan memotivasi warga untuk mendukung reformasi birokrasi, memobilisasi sumber daya masyarakat melalui komunikasi persuasif untuk mencapai visi bersama. Organizational Stewardship: Kepala desa mengelola organisasi desa dengan fokus pada pembangunan komunitas dan pelayanan publik berkualitas, memastikan sumber daya dan sistem manajemen yang efisien untuk kemajuan bersama.

Secara keseluruhan, kepala desa berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan dalam penerapan pelayanan yang responsif.

SARAN

Setelah menyimpulkan temuan yang dijelaskan sebelumnya, peneliti merekomendasikan kepada kepala desa agar meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dengan cara mengadakan pertemuan baik dengan warga, pegawai kelurahan, maupun organisasi masyarakat seperti karang taruna untuk membuka sesi forum diskusi terbuka selama 2 minggu sekali di balai desa Sambibulu.

Memastikan bahwa saran-saran dan umpan balik dari masyarakat, pegawai kelurahan, maupun organisasi yang terlibat dalam diskusi akan diimplementasikan secara efektif untuk mengurangi kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan dalam pelayanan publik dengan tindakan memberikan laporan secara berkala tentang progres implementasi yang diusulkan dan mengundang mereka kembali untuk menilai hasil yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan akan ada pengurangan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh kepala desa. Hal ini akan membuat kepala desa dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Sambibulu terpenuhi secara lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, R. M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humaniora*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Handoyo, S. (2010). Pengukuran servant leadership sebagai alternatif kepemimpinan di institusi pendidikan tinggi pada masa perubahan organisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 130. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.675>
- Hutahean, W. S. (2021). *Filsafat dan teori kepemimpinan* (L. L. Mabruroh, Ed.). Ahlimedia Press. https://books.google.co.id/books/about/FILSAFAT_DAN_TEORI_KEPEMIMPINAN.html?id=kSYrEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Data prioritas Kementerian PANRB untuk Kabupaten/Kota*. <https://1data.menpan.go.id/>
- Ma'ruf, Sahlania, O., Ashariyana, & Mana, R. (2023). Implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi Laika di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 14(1), 22–29. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i1.484>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (Vol. 2). Sage Publications. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=498252>

- Mustakim, M. Z. (2015). *Kepemimpinan desa* (S. Huda, Ed.; Vol. 1). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. https://dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150410_9279.pdf
- Pahlevynur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. B., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisyia, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024, Pub. L. No. 33, 15 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/114292/33.%20PERBUP%2033%20TH%202019.pdf>
- Peraturan Desa Sambibulu No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (2022). http://sambibulu.desa.id/index.php/dokumen_web/unduh_berkas/7
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi (2011). <https://jabar.bpk.go.id/files/2010/04/PERMENPAN-2011-No.-011-Buku-5-Kriteria-Dan-Ukuran-Keberhasilan-RB.pdf>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. (n.d.). Retrieved November 25, 2023, from https://bappeda.sidoarjokab.go.id/downloads/FINAL%20%28DOK+PERDA%29%20Perda_2_TH_2021_RPJMD%20Sidoarjo.pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (22nd ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6, 16 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf>